

**PENGARUH KOLONIALISASI BELANDA DI KAWASAN PUSAT KOTA PULAU JAWA : SEBUAH
KAJIAN LITERATUR
(THE EFFECT OF NETHERLANDS COLONIALIZATION IN CITY CENTER OF JAVA ISLAND:
A LITERATURE STUDY)**

Dimas Wihardyanto^{1*}, Dwita Hadi Rahmi²
Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada¹,
Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada²,
e-mail: ^{1*}dimas@ugm.ac.id, ²dwitahr@ugm.ac.id

Abstrak_Selama kolonialisasi Belanda, kota-kota di Indonesia pada umumnya dan kota-kota di Jawa pada khususnya mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan. Pengaruh tersebut terlihat jelas pada kawasan pusat kota. Pola pusat kota Jawa yang telah terbentuk sejak masa kerajaan Hindu-Budha dan berkembang pada masa kerajaan Islam menerima pengaruh Eropa semenjak Belanda mulai menjajah Indonesia. Melalui metode kajian literatur, peneliti mencoba mengkaji bagaimana pengaruh kolonialisasi Eropa terhadap pusat kota di Jawa. Dari hasil kajian literatur diketahui bahwasanya pusat kota Jawa berkembang dari yang semula sangat kental nuansa kosmologisnya menjadi semakin fungsional untuk melayani masyarakat terutama masyarakat Eropa. Terdapat perbedaan pengaruh Eropa terhadap pusat kota di Jawa mengikuti letak posisi geografis kota tersebut. Kota-kota yang berada di pesisir Jawa akan menerima pengaruh Eropa dengan pendekatan akuisi, dan kota-kota di pedalaman Jawa akan menerima pengaruh Eropa dengan pendekatan akulturasi. Perbedaan pendekatan tersebut kemudian menghasilkan wajah pusat kota yang berbeda, dimana kota-kota di pesisir Jawa akan cenderung memiliki wajah Eropa atau campuran dengan Eropa sebagai dominasi, dan kota-kota di pedalaman Jawa akan cenderung tetap memiliki wajah pribumi atau campuran dengan pribumi sebagai dominasi.

Kata kunci: Arsitektur Kolonial; Pusat Kota; Kota Pesisir; Kota Pedalaman; Kajian Literatur.

Abstract_ During Dutch colonialism, cities in Indonesia in general and cities in java, in particular, gained significant influence. The influence is seen in the downtown area. The influence is seen in the downtown area. The pattern of the Javanese city centre that had been formed since the Hindu-Buddhist kingdom and developed during the Islamic kingdom received European influence since the began to colonialism in Indonesia. Through the method of literature review, researchers tried to describe how European colonialism in the city centre on Java. From the results of the literature study, it was known that the central city of Java developed from what was once a very thick cosmological nuance to become increasingly functional to serve the public, especially European society. There are differences of European influence to the central city of Java following the geographical position of the city. The cities on the coast of Java will receive European influence with the acquisition approach, and cities on the island of Java will receive European influence with the acculturation approach. The difference of both approaches results in a different face of the central city, where cities on the coast of Java will tend to have a European or mixed face with Europe as domination, and cities in the island of Java will tend to continue to have an indigenous face or mix with the indigenous as domination.

Keywords: Colonial Architecture; Central City; Coastal City; Inland City; Literature Review.

¹ Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada

² Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada

PENDAHULUAN

Kolonialisasi Belanda di Indonesia yang berlangsung lama tentunya memberikan banyak pengaruh pada arsitektur bangunan dan kota. Menurut Passchier (2007), Handinoto (2010), dan Leuhuis (2014) dalam Wihardyanto (2019), modernisasi yang terjadi pada masa kolonialisasi Belanda di Indonesia menjadikan perkembangan arsitektur maupun kota di Indonesia menjadi lebih logis dan terukur. Selanjutnya Wihardyanto (2019) menyimpulkan dari pernyataan Suptandar (2001), Silas (2005), Nas dan Vletter (2009), Soekiman (2011), bahwa arsitektur Eropa yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia secara perlahan namun pasti mempengaruhi arsitektur dan tata kota lokal membentuk pola tersendiri yang kemudian menjadi simbol identitas tersendiri. Lebih lanjut, kota-kota di Indonesia yang mendapatkan pengaruh kolonialisasi Belanda akan terlihat berbeda dengan kota-kota lokal karena terdapat pertimbangan-pertimbangan logis Barat selain aspek budaya maupun kosmologi lokal. Adapun beberapa pertimbangan logis yang dimaksud disini adalah kelengkapan infrastruktur, kesehatan lingkungan, serta aspek kenyamanan yang lebih terjamin.

Sebelum kolonialisasi Belanda berlangsung, Jawa telah dikenal sebagai salah satu pusat peradaban di Indonesia. Hal ini terlihat dari sistem kehidupan sehari-hari yang telah tertata dengan baik, dimana arsitektur dan tata kota di Jawa juga telah memiliki pola yang jelas dan tersistematis. Pada masa kerajaan Majapahit yang merupakan puncak kejayaan kerajaan Hindu Budha di Jawa, konsep penataan pusat kota telah menggunakan beberapa kaidah dalam rangka mendapatkan keseimbangan fungsi antara pemerintahan, ekonomi, religi, dan sosial budaya. Diantaranya yang menonjol adalah konsep Tri Angga, orientasi *Kaja-Kelod*, serta *Prapatan Agung* (Munandar, 2008). Setelah berakhirnya era Kerajaan Hindu Budha di Jawa, dan digantikan dengan Era Kerajaan Islam di Jawa, pola penataan pusat kota yang telah digunakan pada masa Hindu Budha tidak serta merta hilang, melainkan berevolusi tanpa menghilangkan keseimbangan fungsi antara pemerintahan, ekonomi, religi, dan sosial budaya (Adrisijanti 2000). Menurut beberapa sumber seperti Adrisijanti (2000), Handinoto (2010), serta Revianto dan Suwito (2008) beberapa konsep yang digunakan dalam penataan pusat kota Jawa di era Kerajaan Islam adalah Catur Gatra, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, dan lain-lain.

Pada masa kolonialisasi Belanda di Indonesia, Jawa semakin memiliki posisi yang penting, hal ini dikarenakan Jawa kemudian menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa hasil pembangunan berteknologi tinggi pada masa itu yang tidak terdapat di pulau yang lain misalnya jalur kereta api dan kelengkapannya (Stroomberg 2018). Kondisi politik kolonialisasi yang semakin stabil, serta pembangunan yang pesat di Hindia Belanda mengakibatkan laju migrasi penduduk Eropa yang cukup signifikan yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan perkotaan khususnya di Jawa (Soemardjan 1962). Dengan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mantap dan stabil di Jawa, maka perkembangan pusat kota di Jawa tentunya akan lebih terpengaruh dengan model perkembangan pusat kota di Belanda atau Eropa pada umumnya.

Pada penelitian kali ini akan dibahas bagaimana kolonialisasi mempengaruhi perkembangan pusat kota di Jawa melalui metode studi literatur. Adapun studi literatur yang dilakukan akan fokus

membahas kontekstualisasi teori-teori yang menerangkan mengenai perkembangan pusat kota di Eropa terhadap perkembangan pusat kota di Jawa.

METODE

Penelitian mengenai perkembangan arsitektur maupun kota kolonial Belanda di Indonesia maupun di Pulau Jawa memang sudah banyak dilakukan, namun demikian kajian terhadap teori-teori mengenai pengaruh pola perkembangan pusat kota di Eropa terhadap pusat kota-kota di Jawa belum banyak dilakukan. Umumnya, penelitian yang telah dilakukan cenderung hanya membahas pusat kota tertentu saja, dan belum membahas secara komprehensif pengaruh kolonialisasi Belanda terhadap perkembangan pusat kota di Jawa.

Pulau Jawa sendiri digunakan sebagai studi kasus tanpa membedakan daerah pesisir maupun pedalaman. Pulau Jawa dipilih atas dasar pertimbangan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat segala pemerintahan Belanda di Indonesia, sehingga pembangunan disegala sektor tentunya akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan demikian maka persinggungan antara arsitektur lokal beserta konteks yang ada di dalamnya dengan arsitektur Eropa yang dibawa oleh Belanda akan sangat mungkin terjadi. Dari beberapa pertimbangan di atas maka diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia melalui studi kasus pusat kota di Pulau Jawa.

Metodologi atau pendekatan penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan kualitatif dengan menonjolkan metode penelitian kajian literatur. Literatur yang digunakan pada penelitian ini adalah teori-teori mengenai pusat kota di Eropa beserta bagaimana perkembangannya, serta teori-teori mengenai pusat kota di Pulau Jawa pada masa kolonialisasi Belanda yang dianggap cukup kredibel dan populer digunakan pada penelitian-penelitian mengenai arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Teori-teori mengenai pusat kota di Eropa beserta bagaimana perkembangannya akan dikontekstualkan terhadap teori-teori mengenai pusat kota di Pulau Jawa pada masa kolonialisasi Belanda. Tujuannya adalah untuk menguraikan bagaimanakah pendekatan pembangunan perkotaan Eropa beradaptasi terhadap pola kota Jawa yang sudah ada sebelumnya.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah narasi yang komprehensif yang menerangkan bagaimanakah pola pusat kota di Eropa diterapkan, dan beradaptasi terhadap pola pusat kota Jawa yang telah ada sebelumnya beserta faktor-faktor yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pusat Kota di Eropa

Pada sub bab ini akan diuraikan bagaimanakah kota-kota di Eropa tumbuh dan berkembang dari masa Klasik hingga Revolusi Industri. Pemilihan rentang waktu tersebut disesuaikan dengan rentang waktu kemunculan pola kota di Jawa hingga munculnya pengaruh kolonialisasi Eropa di pusat-pusat Kota Jawa seperti yang diuraikan pada teori-teori yang saat ini ada baik di bidang Antropologi maupun Arsitektur. Terdapat dua buah literatur pokok yang digunakan pada sub bab ini yaitu buku *The City Shape, Urban Patterns and Meaning Through History* karya Kostof (1991) dan buku *The City Assembled, The Elements of Urban Form Through History* karya Kostof (1992). Dua buah literatur tersebut dianggap sangat tepat karena selain ditulis oleh seorang sejarawan arsitektur yang kemampuannya tidak diragukan, literatur

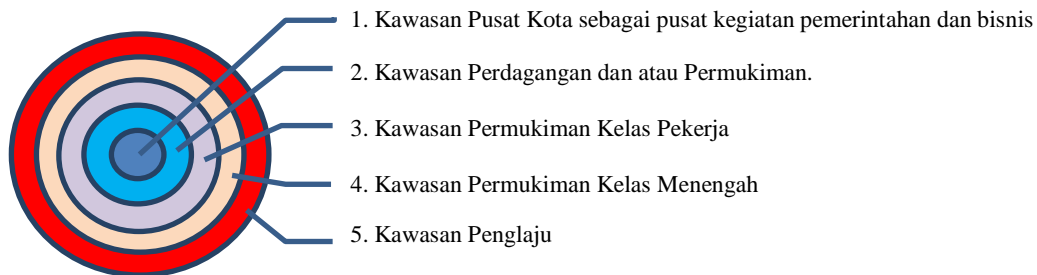
tersebut mampu menguraikan dengan detail perkembangan suatu kota di Eropa dari sudut pandang ilmu sejarah arsitektur. Meskipun demikian, peneliti juga menggunakan beberapa literatur pendukung lainnya untuk memperjelas dan memperkaya bahasan.

Menurut Kostof (1991), kemunculan kota-kota di Eropa awalnya berada di pedalaman. Umumnya munculnya kota diakibatkan karena adanya surplus sumber daya alam yang dikelola oleh seseorang atau kelompok orang. Seseorang atau kelompok orang tersebut selanjutnya mampu memperoleh keuntungan ekonomi dari pengelolaan surplus sumber daya alam. Hal ini selanjutnya mendorong mereka untuk membuat tembok pembatas atau benteng untuk keamanan sumber daya alam yang dikuasai sekaligus menegaskan kekuasaan mereka. Fenomena ini terjadi pada masa Pra Klasik, terkenal dengan istilah tuan tanah / *lord* di Britania Raya yang kelak bertransformasi menjadi kerajaan pada Masa Klasik Eropa. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya kemunculan kota-kota di Eropa diawali oleh motif penguasaan ekonomi dan diwujudkan dalam bentuk benteng.

Pola pertumbuhan kota seperti diuraikan pada paragraf di atas terus berlangsung sampai dengan Masa Klasik Eropa dimana gereja mendapatkan legitimasi kekuasaan bersanding dengan raja-raja. Kota-kota berkembang dengan tidak terencana (*unplanned city*) mengikuti bentang alam yang ada sebagai batas sekaligus pola jalannya (Kostof, 1992). Kemajuan kota-kota tersebut menarik minat masyarakat bermigrasi untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik salah satunya dengan berdagang. Kemajuan ekonomi kota yang pesat tentunya tidak mampu diwadahi dalam bentuk benteng yang terbatas oleh karena itu pada Masa Klasik kota-kota di Eropa tidak lagi tergantung pada peran dan fungsi benteng. Sistem pemerintahanpun berkembang dari semula monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusi dimana kaum bangsawan, rohaniawan, dan oligarki mendapatkan peran dalam pemerintahan. Kedua hal tersebut menurut Kostof (1991) mendorong kota bertransformasi. Lebih lanjut Kostof (1991) menjelaskan bahwa pada Masa Klasik Eropa, kota-kota terdiri dari pusat kota dan bagian-bagian kota lain yang menyokong. Kostof (1992) selanjutnya menggolongkan kota jenis ini sebagai pola kota konsentrik. Pola kota konsentrik menonjolkan pusat kota yang memegang fungsi birokrasi, religi, dan perumahan secara terbatas untuk raja, keluarga raja, bangsawan, dan rohaniawan. Raja dan kaum aristokrat memiliki peran sentral terhadap pertumbuhan kota sehingga secara fisik pusat kota menonjolkan simbol-simbol fisik kosmologi dari religi dan birokrasi yang menegaskan raja sebagai wakil Tuhan. Fungsi ekonomi sebagai penggerak kota pada masa ini tidak memiliki area khusus melainkan melebur diantaranya.

Pada saat ini menurut Kostof (1991), dan Short (1999), kota memiliki pola konsentris dengan jalan-jalan penghubung antar bagian kota yang bersifat organik. Meskipun demikian menurut Short (1999), dikarenakan pusat kota menjadi bagian yang sangat penting maka jalan-jalan penghubung mengarah ke pusat kota sehingga muncul bentuk jalan menyerupai grid. Semakin kuatnya peran raja dan gereja serta didukung oleh kaum pedagang selanjutnya memunculkan kebijakan 3G (*Gold, Gospel, Glory*) yang selanjutnya mendorong munculnya kolonisasi dalam rangka mencari sumber-sumber daya alam untuk dijual di pasar Eropa. Hal ini membawa konsekuensi bahwasanya kota-kota di Eropa semakin berkembang, dan meluas. Menurut Kostof (1991) kota-kota di Eropa pada masa ini mulai berkembang secara organik mengikuti bentang alam meskipun tetap mempertahankan pola konsentrik. Short (1999) memperkuat pernyataan ini dengan menyatakan bahwasanya kawasan pusat kota pada masa ini (600 - 1700 M) mulai diwarnai dengan adanya konektivitas dengan kawasan lain yang dihuni atau dikembangkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Lebih lanjut Short (1999)

menyatakan bahwasanya hal ini yang berakibat pada struktur kota yang konsentrik namun terbagi menjadi beberapa bagian kota yang terkoneksi baik. Kostof (1992) menambahkan bahwasanya di dalam kawasan pusat kota kemudian muncul beberapa fasilitas-fasilitas publik untuk menunjang fungsi ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Pada era pra industrialisasi ini Burgess (1923) menggambarkan zonasi kota berbentuk radial konsentrik (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Kota di Eropa Era Revolusi Industri dan Setelannya
Sumber: Burgess (1923)

Pada masa selanjutnya (Abad 18 s.d. 20 M) Short (1999) menjelaskan bahwasanya fase perkembangan kota di Eropa secara umum mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat munculnya revolusi industri yang didukung oleh kaum pedagang. Hal ini menurut Kostof (1992) mengakibatkan model pertumbuhan berbasis kosmologi yang menonjolkan kekuasaan raja bergeser ke model pertumbuhan organik yang dikembangkan secara terukur untuk mendapatkan pemerataan akses bagi semua warga kota. Pada kawasan pusat kota, Kostof (1992) menjelaskan bahwasanya adanya sumbu kota yang monumental, batas kota yang berbentuk fisik, struktur jalan berbentuk grid yang kaku, serta organisasi spasial berdasarkan strata sosial berubah menjadi kawasan pusat kota yang humanis, dikembangkan untuk mewadahi kebutuhan masyarakat, jaringan jalan dikembangkan secara grid-organik mengikuti bentang alam yang tersedia. Kostof (1991) menambahkan bahwasanya perkembangan kota selanjutnya tidak lagi murni berpola konsentrik namun juga organik mengikuti kepentingan umum yang ada.

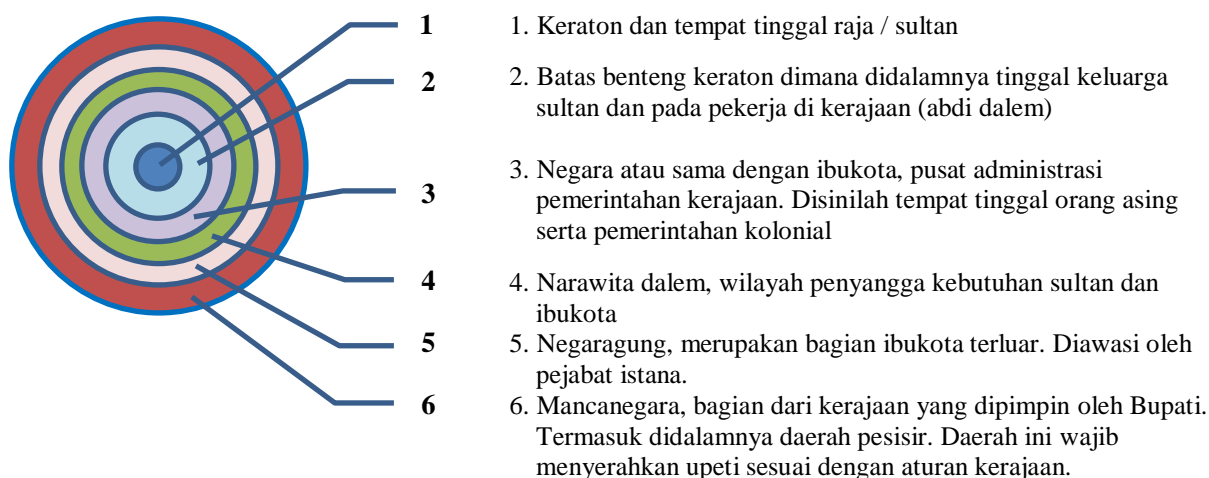
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya secara umum kota-kota di Eropa muncul karena adanya penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh suatu kelompok. Selanjutnya kota-kota di Eropa awalnya dikembangkan dengan menonjolkan kawasan pusat kota sebagai simbol kosmologi bahwasanya raja adalah wakil Tuhan untuk mengelola alam dan manusia yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dimana perdagangan semakin berperan penting untuk menghidupi ekonomi kota maka legitimasi raja semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan kota tidak lagi berkembang secara konsentris, melainkan organik menonjolkan keterhubungan antara bagian-bagian kota yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Adanya revolusi industri membawa pendekatan baru bagi perkembangan kota dimana kota mulai direncanakan untuk lebih mewadahi kepentingan publik, salah satu akibatnya adalah kawasan pusat kota mulai dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas publik guna memenuhi fungsi ekonomi, sosial, maupun budaya.

B. Perkembangan Pola Pusat Kota di Jawa

Secara tradisional, kota-kota di Jawa secara umum dapat dibagi menjadi 2 menurut aspek geografis yaitu kota di pedalaman dan kota di pesisir (Nas, 2007). Lebih lanjut Nas

(2007) menerangkan bahwa kota di pedalaman dan pesisir Jawa secara tradisional telah memiliki perbedaan karakteristik. Meskipun tidak seluruhnya, kota-kota besar yang berada di pedalaman Jawa umumnya merupakan kota-kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan kota-kota-kota besar di pesisir Jawa umumnya berperan sebagai pusat-pusat ekonomi berbasis perdagangan.

Kota-kota di pedalaman Jawa terbentuk seiring dengan berkembangnya pemerintahan yang disimbolkan secara fisik oleh keraton Santoso (1984). Santoso (1984) menerangkan lebih lanjut bahwasanya seiring dengan lengkapnya elemen keraton, struktur kota terbentuk mengikuti pola konsentris yang menyimbolkan sistem kekuasaan raja Jawa yang dikenal dengan konsep Dewa-Raja. Santoso (1984) juga menyatakan bahwasanya dari artefak yang ditemukan pola kota seperti dijelaskan di atas telah ada pada masa kerajaan Hindu Budha di Jawa. Berbeda dengan kota-kota di pedalaman Jawa, kota-kota di pesisir Jawa umumnya tidak terbentuk dari adanya sebuah simbol fisik, melainkan karena adanya kegiatan berdagang, sehingga elemen-elemen yang menonjol dari kota-kota pesisir Jawa adalah adanya pasar dan pelabuhan (Lombard, 1996). Lebih lanjut Lombard (1996) menjelaskan bahwasanya daerah pedalaman dan daerah pesisir memiliki hubungan saling mendukung dalam hierarki kota Jawa (gambar 2). Senada dengan Lombard (1996), Damayanti dan Handinoto (2005) menjelaskan hubungan antara kota pedalaman dan kota pesisir tersebut dengan istilah *political domain* dan *economical domain*.

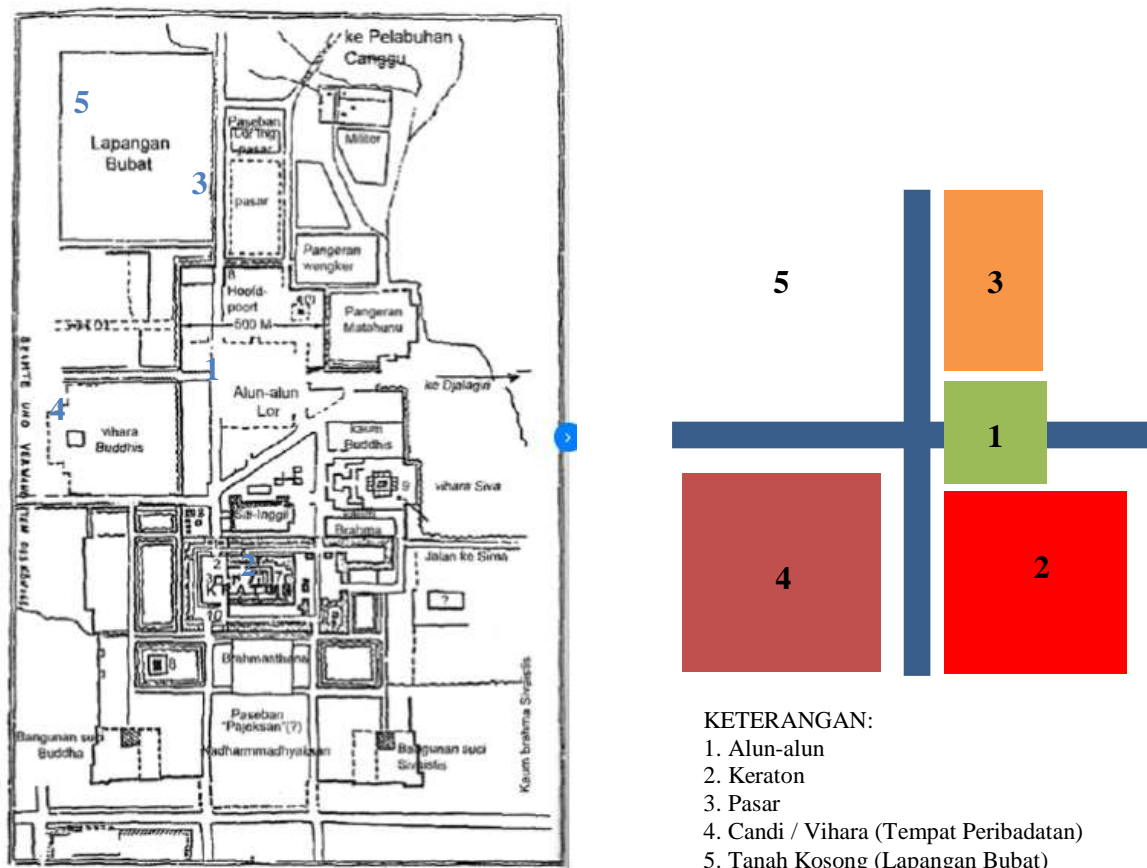


Gambar 2. Konsep Penataan Wilayah Kerajaan Jawa
Sumber: Santoso (1984) dalam Damayanti, 2005.

Saat ini pola pusat kota yang banyak kita jumpai di Pulau Jawa adalah pola kota yang dikembangkan pada masa kerajaan Islam (Adrisijanti 2000). Lebih lanjut Adrisijanti (2000) menyatakan bahwasanya pola kota yang dikembangkan pada masa kerajaan Islam di Jawa berasal dari pola kota yang dikembangkan pada masa Hindu Budha. Hal ini didasarkan pada kemiripan elemen pusat kota pada masa kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam di Jawa. Berdasarkan gambar peta rekonstruksi dan ekskavasi Kota Trowulan di Mojokerto yang dilakukan oleh Ir. Henry Maclaine Pont tahun 1924, pusat Kota Trowulan digambarkan oleh Handinoto (1992) dan Munandar (2008) sebagai dua buah jalan yang berpotongan tegak lurus membentuk sebuah perempatan dimana orientasi *Kaja-Kelod* dan *Kauh-Kangin* pada konsep

Tri Hita Karana Agama Hindu menjadi penting. Adapun orientasi *Kaja* adalah Gunung Arjuna yang berada di sebelah Selatan, dan *Kelod* adalah Laut Jawa yang berada di sebelah Utara. Sedangkan orientasi *Kauh* adalah arah Timur tempat matahari terbit, dan orientasi *Kangin* adalah arah Barat tempat matahari tenggelam.

Munandar (2008) juga menjelaskan bahwasanya titik tengah perpotongan jalan menunjukkan posisi madyaning madya pada konsep Triangga. Lebih lanjut, Munandar (2008) menjelaskan bahwasanya pada posisi utamaning utama (kaja-kauh) terdapat keraton, tempat peribadatan atau candi berada pada posisi utamaning nista (kaja-kangin), dan alun-alun serta pasar terletak pada posisi nistaning utama (kelod-kauh). Pada posisi nistaning nista (kelod-kangin) terdapat tanah lapangan (Lapangan Bubat) tanpa adanya bangunan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwasanya 4 buah elemen utama penyusun pusat kota Jawa adalah Keraton, Tempat Peribadatan, Alun-alun, dan Pasar. Masing-masing elemen diletakkan menurut kepercayaan kerajaan pada saat itu yakni Hindu-Budha. Santoso (1984) dan Munandar (2008) menambahkan bahwasanya posisi keraton yang dilingkupi oleh dinding pelindung pada bagian utamaning-utama menegaskan peran Dewa-Raja yang dipegang oleh pemimpin kerajaan.



Gambar 3. Sketsa Pusat Kota Lor Trowulan oleh Ir. Henri Macleine Pont (kiri), Skema Letak Elemen Arsitektur Kawasan Pusat Kota Trowulan (kanan)
Sumber: Handinoto, 1992 (kiri), Peneliti, 2020 (kanan).

Setelah kerajaan bercorak Hindu-Budha di Jawa mengalami kesurutan, maka muncullah kerajaan bercorak Islam di Jawa. Menurut Adrisijanti (2000) pusat kota Jawa pada masa

kerajaan Islam memiliki kemiripan dari segi elemen penyusun dan posisinya. Meskipun demikian, pendekatan Islam pada penataan pusat kota pada masa Kerajaan Islam di Jawa mampu mengikis penggunaan prinsip-prinsip Hindu-Budha seperti Tri Hita Karana dan Triangga. Adrisijanti (2000) menjelaskan bahwasanya hal yang menonjol pada penataan pusat kota pada masa Kerajaan Islam di Jawa adalah posisi Alun-alun yang semakin penting, yakni berada di tengah-tengah pusat kota. Hal ini menurut Adrisijanti (2000) dan Santoso (1984) merupakan salah pengaruh dari ajaran Islam yang mengajarkan kesetaraan antar manusia (tanpa kasta), dimana alun-alun dapat diartikan sebagai tempat bertemunya raja dan rakyat. Selain itu, pengaruh Islam juga terlihat pada perletakan masjid sebagai tempat ibadah yang diletakkan disebelah Barat dari alun-alun agar dapat menghadap kiblat. Selebihnya, perletakan keraton dan pasar pada masa Kerajaan Islam di Jawa tampak serupa dengan perletakan keraton yang dilingkupi oleh dinding pelindung dan pasar pada masa Kerajaan Majapahit di Kota Trowulan yakni keraton di sebelah Selatan, dan pasar terletak di sebelah Utara. Sampai saat ini belum didapatkan penjelasan filosofis yang mendasari kemiripan hal tersebut, hanya saja menurut Santoso (1984), dan Handinoto (1992) posisi Utara menurut kepercayaan Jawa diyakini memiliki fungsi yang lebih profan dibandingkan dengan posisi Selatan yang lebih memiliki nilai sakral. Hal tersebut berhubungan dengan posisi Selatan yang lebih sakral karena legenda Nyi Roro Kidul yang diyakini masyarakat Jawa (Santoso, 1984). Penjelasan lebih logis dari sisi iklim adalah bahwa keraton di Jawa pada posisi Selatan akan memiliki arah hadap ke Utara, dengan demikian kenyamanan huninya akan lebih baik dibandingkan bangunan profan yang menghadap ke Selatan. Hal ini dikarenakan posisi Jawa yang berada di Selatan khatulistiwa akan memiliki posisi matahari yang dominan di sebelah Selatan sepanjang tahunnya. Dengan arah hadap ke Utara maka sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan adalah sinar matahari tidak langsung.



KETERANGAN:

1. Alun-alun
2. Masjid
3. Pasar
4. Siti Hinggil (Bagian Keraton)
5. Keraton
6. Rumah Pangeran
7. Rumah Pejabat Keraton
8. Rumah Abdi Dalem

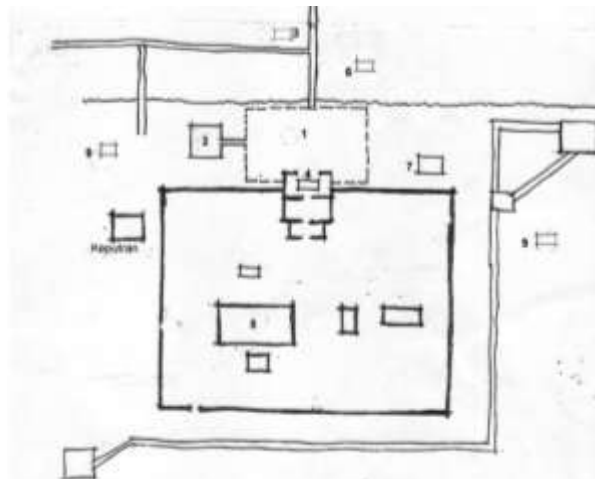
Gambar 4. Peta Kota Kerajaan Pajang, Ibu Kota Kerajaan Islam Setelah Demak
Sumber: Museum Radya Pustaka Surakarta.



Gambar 5. Peta Pusat Kota Kerajaan Mataram Islam Pertama (*Kotagede*)
Sumber: Museum Radya Pustaka Surakarta.

KETERANGAN:

1. Alun-alun
2. Masjid
3. Pasar
4. Dalem Keraton
5. Pemukiman Abdi Dalem
6. Pemukiman Pengrajin
7. Pemukiman Pedagang
8. Kebonan



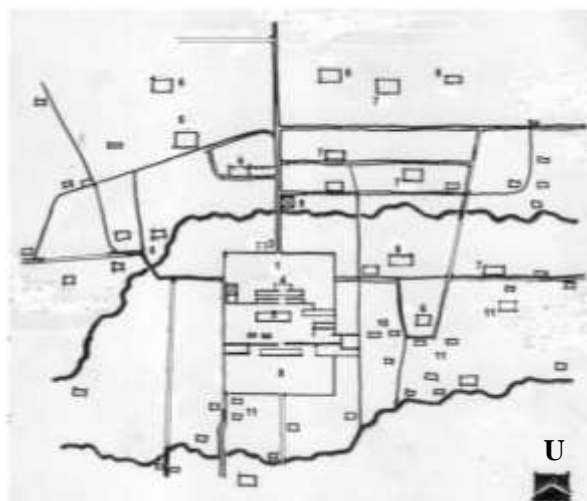
Gambar 6. Peta Pusat Kota Kerajaan Mataram Islam di Plered (Setelah Kota Gede)
Sumber: Museum Radya Pustaka Surakarta.

U



KETERANGAN:

1. Alun-alun
2. Masjid
3. Pasar
4. Siti Hinggil (Bagian Keraton)
5. Dalem Keraton
6. Rumah Pangeran
7. Rumah Pejabat Keraton
8. Segoroyoso
9. Pemukiman Abdi Dalem



Gambar 7. Peta Pusat Kota Kerajaan Mataram Islam di Kartasura (Setelah Plered), Awal Mula Belanda Mempengaruhi Kota-Kota Pusat Pemerintahan Kerajaan di Jawa
Sumber: Museum Radya Pustaka Surakarta.

KETERANGAN:

1. Alun-alun Utara
2. Masjid
3. Pasar
4. Siti Hinggil (bagian dari keraton)
5. Dalem Keraton
6. Rumah Pangeran
7. Rumah Pejabat Keraton
8. Alun-alun Selatan
9. Benteng Belanda
10. Pecinan
11. Pemukiman Abdi Dalem

Dari beberapa paragraf di atas dapat diketahui bahwasanya pusat kota di Jawa menegaskan peran sentral penguasa dalam membentuk, mengatur, serta mengembangkan kota. Hal ini serupa dengan sejarah perkembangan kota-kota di Eropa khususnya pada era pra industrialisasi. Selain itu pusat kota di Jawa dan di Eropa sama-sama memiliki peran sentral sebagai pusat kekuasaan, agama, ekonomi, dan sosial budaya meskipun wujud arsitekturalnya berbeda. Secara khusus, tempat tinggal penguasa yang terdapat di pusat kota di Eropa maupun di Jawa sama-sama memiliki dinding pelindung meskipun bentuknya berbeda.

Jika mengacu pada Kostof (1992) mengenai tipe dan pola pertumbuhan kota maka kota-kota di Eropa pra-industrialisasi dan kota-kota di Jawa pada masa pra kolonial tergolong tipe kosmik yang berkembang dengan pola konsentrik. Pernyataan tersebut senada pernyataan Nas (2007) yang menyatakan bahwa Belanda tidak kesulitan dalam melakukan pengembangan kota-kota di Indonesia dikarenakan pola dasar dari kota-kota di Indonesia memiliki kemiripan dengan pola kota di Eropa. Lebih lanjut, Nas (2007) menjelaskan bahwasanya faktor stabilitas keamanan adalah faktor yang terlebih dahulu harus dipastikan sebelum Belanda mengembangkan kota di Indonesia. Di Jawa, khususnya setelah pengaruh Islam penataan wilayah kekuasaan raja diatur dengan pembagian zona yang hierarkis dengan pusat kota sebagai inti. Hierarki wilayah kekuasaan raja tersebut selaras dengan hierarki pemerintahan pada struktur kerajaan Islam di Jawa (Surjomihardjo 2008). Santoso (1984), (Wihardyanto 2019) Damayanti (2005) menggambarkan pembagian wilayah kekuasaan raja di Jawa dengan skema radial konsentris dengan pusat kota pada bagian inti yang berada di tengah. Adapun yang menarik dari gambaran skema tersebut adalah adanya kemiripan dengan zonasi kota di Eropa pra industrial yang digambarkan oleh (Burgess 1923).

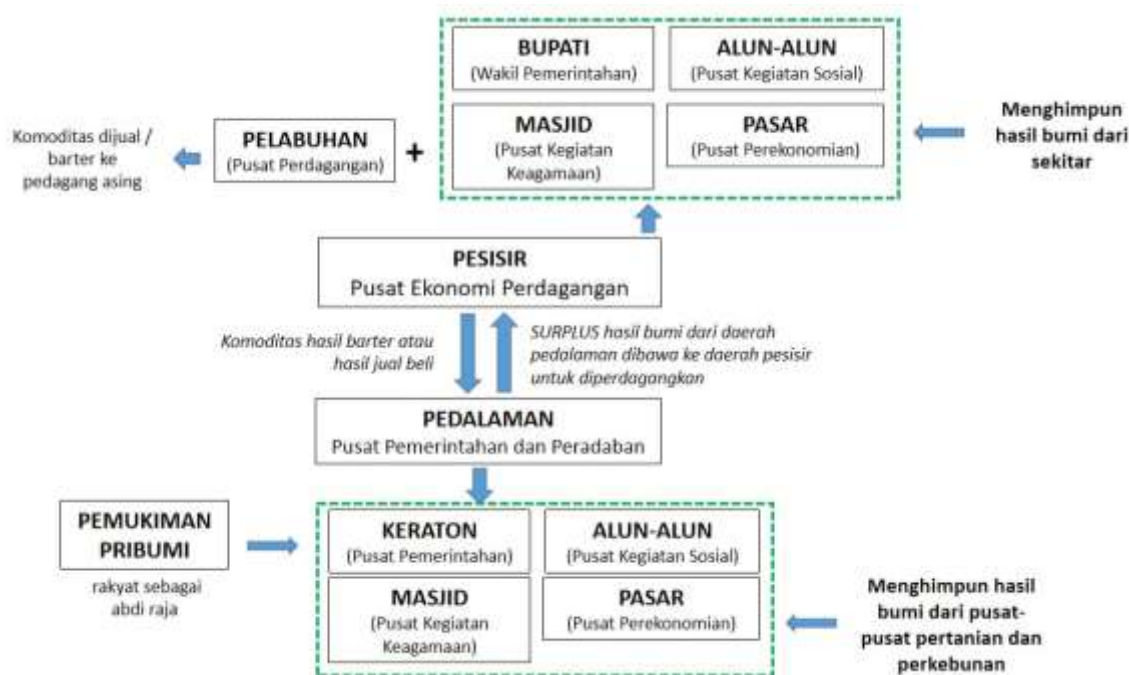
C. Pengaruh Kolonialisasi Belanda Pada Pusat Kota di Jawa

Kolonialisasi Eropa ke berbagai belahan dunia mengakibatkan munculnya warna Eropa hampir di seluruh kota-kota besar di negara-negara yang mengalami penjajahan (Kostof, 1992). Tidak terkecuali Belanda yang menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Warna Eropa tentunya mempengaruhi arsitektur dan kota di Indonesia, khususnya di Jawa sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Nas (2007) menerangkan bahwasanya perkembangan kota di Indonesia pada masa kolonialisasi Belanda cenderung memiliki pola yang sama dengan yang terjadi di Eropa meskipun dengan ritme yang lebih lamban. Ritme yang lamban tersebut menurut Nas (2007) disebabkan oleh adanya gejolak sosial yang berdampak pada stabilitas keamanan yang perlu dikondisikan terlebih dahulu. Lebih lanjut Nas menjelaskan bahwasanya terdapat 3 wajah kota di Indonesia pada masa kolonialisasi Belanda yaitu wajah pribumi, wajah Eropa, dan wajah campuran. Penilaian wajah kota tersebut berdasarkan dari arsitektur pusat kota sebagai titik tolak perkembangan kota.

Nas (2007) menjelaskan bahwasanya kota-kota yang berada di daerah pesisir cenderung memiliki wajah Eropa atau campuran, sedangkan kota-kota yang berada di daerah pedalaman cenderung memiliki wajah pribumi atau campuran. Senada dengan Nas (2007), Santoso (1984) dalam Damayanti (2005) menjelaskan bahwasanya kota-kota di Jawa dapat digolongkan pula menjadi kota pesisir dan kota pedalaman. Keduanya memiliki kelengkapan elemen dan pola pusat kota yang mirip meskipun dengan pola perwujudan yang berbeda mengikuti status daerah. Namun dalam perkembangannya pusat kota pesisir memiliki pola yang lebih beragam dibandingkan dengan kota pedalaman. Hal ini menurut Nas (2007) dan Roosmalen (2014)

disebabkan karena daerah pesisir umumnya merupakan daerah perdikan (daerah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak) atau daerah otonom dari kerajaan yang berpusat di pedalaman Jawa. Tujuannya adalah untuk menggairahkan minat perdagangan dengan pihak asing. Lebih lanjut Roosmalen (2014) menjelaskan bahwasanya daerah pesisir berperan sebagai pusat ekonomi kerajaan melalui aktivitas perdagangan. Sebagai catatan, ketika VOC datang ke Pulau Jawa, saat itu Kerajaan yang menguasai Jawa adalah Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kerajaan Mataram Islam yang memiliki luas wilayah paling besar. Pelabuhan-pelabuhan dagang di pesisir Jawa Utara umumnya dikuasai oleh Mataram Islam termasuk Batavia sebelum jatuh ke VOC. Lombard (1996) menerangkan bahwasanya beberapa pelabuhan dagang yang cukup ramai adalah Tegal, Jepara, Rembang, Tuban, dan lain-lain.

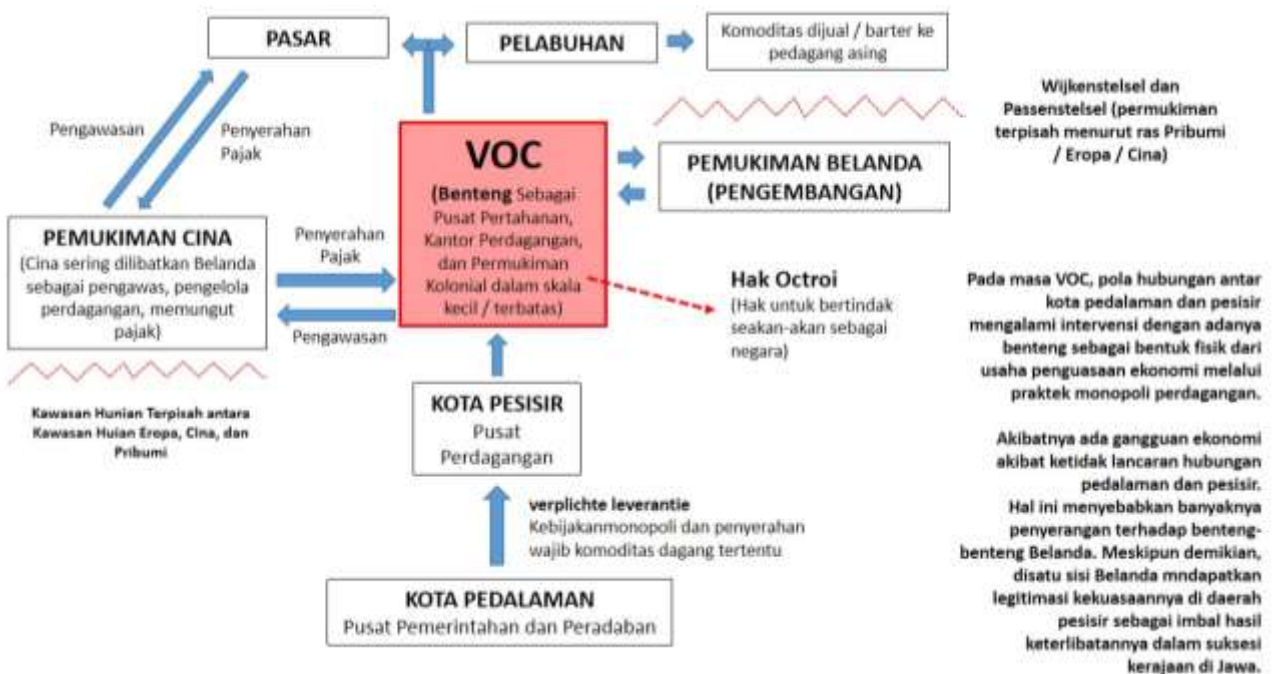
Stroomberg (2018) menambahkan bahwasanya surplus komoditas hasil bumi dari daerah pedalaman dibawa ke pelabuhan untuk kemudian diperdagangkan di pasar atau dikapalkan ke luar. Roosmalen (2014) menambahkan bahwasanya pasar dan pelabuhan merupakan elemen arsitektur yang lebih ramai dibandingkan dengan elemen kota yang lainnya di daerah pesisir. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwasanya ada pelabuhan merupakan elemen khas pada kota-kota pesisir. Keberadaannya merupakan elemen tambahan yang terpisah dari pola pusat kota, namun demikian tetap memiliki hubungan.



Gambar 8. Skema Hubungan Kota Pesisir dan Pedalaman di Jawa Berdasarkan Uraian Utama dari Nas (2007) dan Roosmalen (2014) dan didukung sumber-sumber lain
Sumber: Peneliti, 2020.

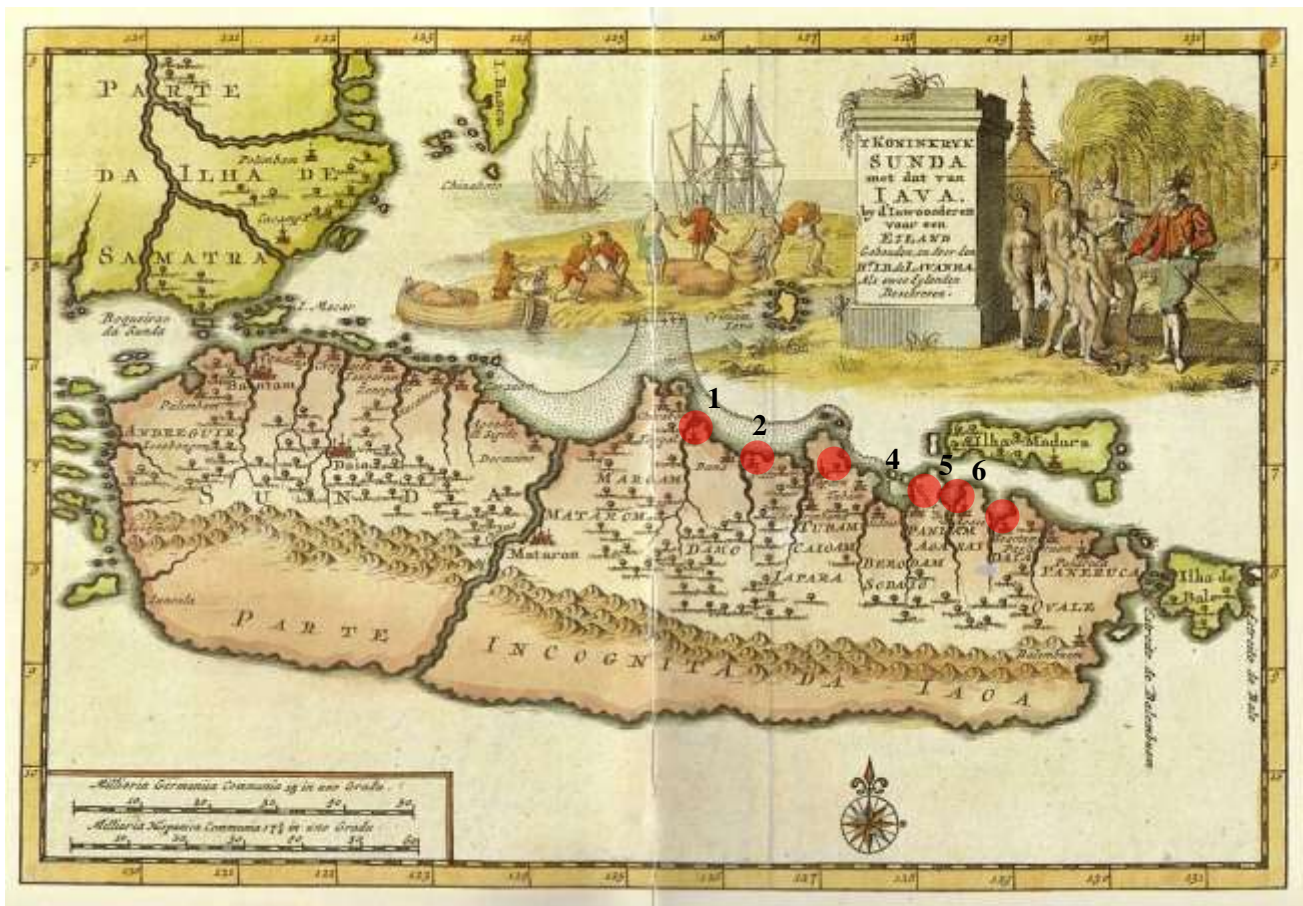
Selanjutnya aktivitas perdagangan yang intensif mampu membuat pedagang asing menetap hingga membentuk pos perdagangan dan kawasan-kawasan pemukiman yang diatur berdasarkan etnis (Wihardyanto 2019). Khusus untuk orang-orang Eropa terutama Belanda, pos perdagangan mereka berbentuk benteng untuk melindungi komoditas dagang yang mereka kuasai melalui praktek monopoli perdagangan (*verplichte leverantie*). Pada awalnya

kolonialisasi Belanda di Indonesia melalui VOC lebih banyak difokuskan terhadap usaha monopoli perdagangan hasil bumi melalui penguasaan daerah-daerah pelabuhan di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa yakni di daerah Pantai Utara Jawa (Leuhuis 2014). Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan yang terdapat pada buku *Fort in Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dengan terlibat pada urusan suksesi dan politik kerajaan lokal, secara cepat VOC mampu menguasai daerah-daerah pelabuhan sebagai kompensasi bantuan yang diberikan oleh VOC terhadap penguasa lokal yang sedang memperebutkan kekuasaan. Di Jawa, VOC terlibat pada politik beberapa kerajaan yang berpengaruh seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kerajaan Mataram Islam sebelum akhirnya terpecah menjadi dua menjadi Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Ngayogyakarta. Adapun yang menjadikan VOC terlibat di dalam politik kerajaan adalah karena adanya keinginan menguasai pelabuhan-pelabuhan dagang yang ramai. Dengan menguasai daerah pesisir maka VOC mampu menguasai perdagangan dan secara tidak langsung memaksa raja yang berada di daerah pedalaman untuk bergantung pada VOC dalam hal ekonomi perdagangan (Stroomberg, 2018). Adapun menurut Stroomberg (2018) penguasaan pelabuhan di Jawa menjadi sempurna setelah Perang Diponegoro berakhir dimana Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dipaksa menyewakan daerah pesisir mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam jangka waktu yang panjang, dan sebagai kompensasinya mereka mendapatkan uang sewa tahunan yang sama besar. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kota-kota di pesisir Indonesia termasuk di Jawa adalah kota yang pertama kali menerima pengaruh asing termasuk pengaruh dari Eropa yang dibawa oleh Belanda.



Gambar 9. Skema Intervensi VOC Melalui Wujud Fisik Benteng Sebagai Pos Perdagangan dan Permukiman Berdasarkan Uraian Utama dari Nas (2007) dan Roosmalen (2014) dan didukung sumber-sumber lain
Sumber: Peneliti, 2020.

Dari Wihardyanto (2019) diketahui bahwasanya dalam menguasai suatu wilayah, Belanda pertama kali menguasai daerah pesisir dengan mendirikan benteng sebagai pos perdagangan yang terlindung. Lebih lanjut Wihardyanto (2019) juga menjelaskan bahwasanya di dalam benteng juga terdapat permukiman beserta fasilitas pendukungnya meskipun secara terbatas. Wihardyanto (2019) juga menjelaskan bahwasanya benteng ini menjadi cikal bakal kota kolonial. Adapun lokasi benteng menurut uraian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2012) umumnya adalah terletak di muara sungai atau di bibir pantai dan dekat dengan pelabuhan perdagangan. Jika dihubungkan dengan pernyataan dari Roosmalen (2014) sebelumnya, maka dapat diketahui bahwasanya di pesisir terdapat dua buah pusat kegiatan yakni pusat perwakilan pemerintahan kerajaan yang posisinya sedikit ke pedalaman, dan pusat perdagangan dengan adanya benteng yang dekat dengan pelabuhan.



Gambar 10. Kota-kota Pesisir Kerajaan Mataram Islam Awal Abad 18 : (1) Tegal, (2) Pati / Rembang, (3) Jepara, (4) Tuban, (5) Gresik / Sedayu, (6) Surabaya, (7) Probolinggo

Sumber: <http://colonialarchitecture.eu/>, diakses 21 Februari 2020

Selanjutnya menurut Soekiman (2011) dan Nas (2007), ketika Belanda telah mampu menguasai keadaan dan monopoli perdagangan semakin maju maka banyak orang-orang Eropa khususnya Belanda yang datang untuk menetap dan berdagang. Menurut Passchier (2007), Handinoto (2010), dan Wihardyanto (2019), pada saat ini dinding benteng dirasa membatasi perkembangan, sehingga pada kasus kota-kota besar kolonial di Jawa dinding

benteng dibongkar agar permukiman untuk orang-orang Belanda dapat diperluas, dan fasilitas umum dapat dilengkapi. Dengan demikian maka yang lebih berkembang adalah pada pusat perdagangan yang seolah-olah kemudian menjadi pusat kota. Lokasinya dekat dengan daerah pelabuhan dan atau benteng, sedangkan pusat perwakilan pemerintahan kerajaan cenderung tetap, lambat berkembang, atau justru kemudian hilang. Hal ini kemudian mengakibatkan kota-kota di pesisir cenderung memiliki wajah Eropa atau campuran dengan dominasi wajah Eropa (Nas, 2007). Kostof (1992) menjelaskan bahwasanya proses ini disebut dengan proses akuisisi, hal ini dikarenakan pusat perdagangan yang semula dikuasai kerajaan di Jawa kemudian diambil alih oleh kolonial Belanda dan dikembangkan menjadi sebuah kota dengan pendekatan Eropa.

Selanjutnya, dengan semakin menguatnya posisi politik Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa menjadikan Belanda memiliki peluang untuk lebih menguasai perekonomian (Soekiman, 2011). Lebih lanjut Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya mereka memanfaatkan tanah-tanah partikelir yang diserahkan sebagai imbalan campur tangan Belanda terhadap urusan kerajaan, ataupun menyewa tanah-tanah milik bangsawan Jawa untuk pertanian maupun perkebunan. Hal ini menjadi faktor pendukung diterapkannya kebijakan *cultuurstelsel* (tanam paksa) oleh Belanda di akhir masa VOC hingga awal pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Adapun tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk *cultuurstelsel* berada lebih ke daerah pedalaman Jawa karena lebih subur. Hal ini menjadikan lama kelamaan Belanda mulai dapat memasuki wilayah pusat kota kerajaan yang berada di pedalaman. Untuk mempermudah membuka dan mengeksploitasi daerah baru, menurut Wihardyanto (2019) pada era ini Belanda mulai membangun jalur-jalur darat baik itu jalan raya maupun rel kereta api.

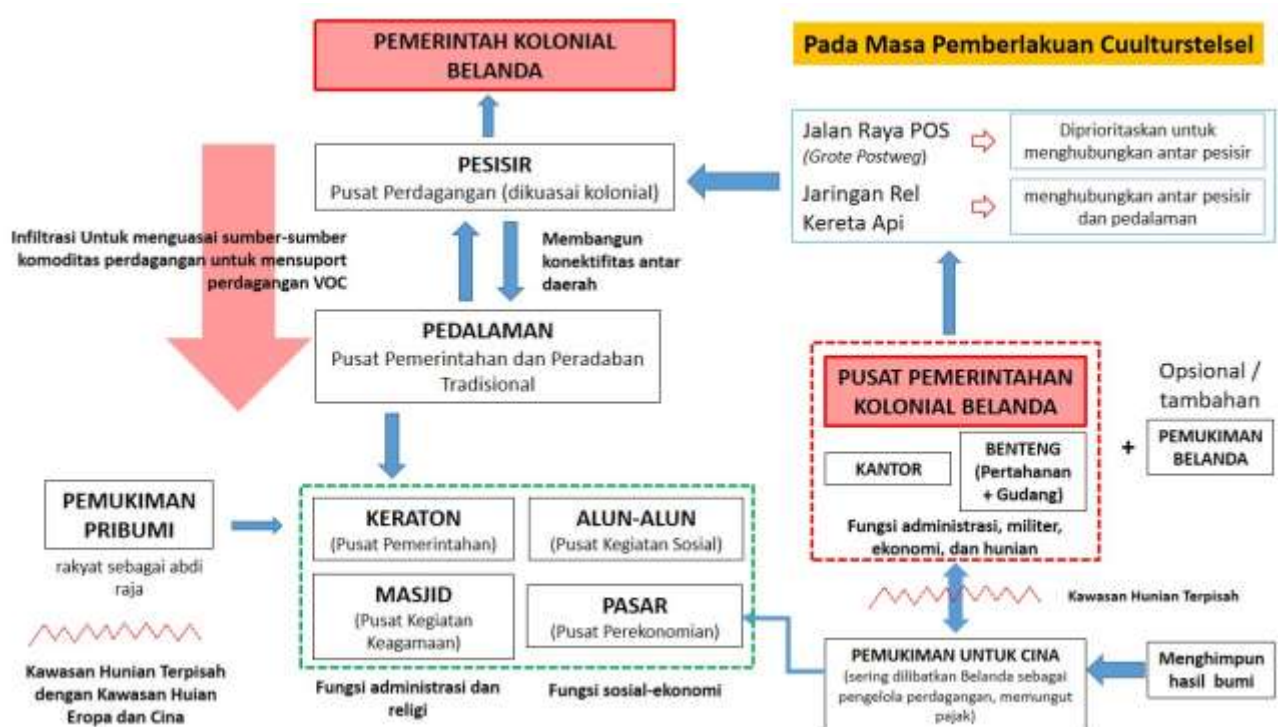
Menurut Stroomberg (2018), praktek sewa tanah milik bangsawan-bangsawan Jawa dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda mampu memberikan pemasukan bagi dua belah pihak meskipun pemasukan terbesar tetap berada di pihak Belanda. Dari uang sewa dan pembagian untung hasil perkebunan, bangsawan-bangsawan Jawa mendapatkan penghasilan dan kesetaraan status sosial dengan orang-orang Eropa (Soekiman, 2011). Hal ini lebih lanjut menurut Soekiman (2011) mempengaruhi gaya hidup bangsawan dan orang-orang Jawa yang semakin terpengaruh Eropa. Di sinilah kemudian gaya hidup yang kebarat-baratan menjadi simbol kemajuan, arsitektur tentunya menjadi alat untuk mencapai gaya hidup tersebut melalui wujud bangunan maupun tata kota.

Cultuurstelsel (1830-1870) yang kemudian disusul selanjutnya oleh undang-undang agrarischewet atau Undang-undang Liberalisasi Agraria (1870-1942) diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada kurung waktu Abad 19-20. Pada saat ini sebagian besar Jawa dikuasai oleh Kerajaan Mataram Islam yang belum ditaklukkan oleh Belanda meskipun telah terbagi dua menjadi Kasunanan Surakarta yang beribukota di Solo dan Kasultanan Yogyakarta yang beribukota di Yogyakarta. Kerajaan-kerajaan lain yang ada di Jawa terutama kerajaan di Jawa bagian barat sebelumnya telah mampu ditaklukkan oleh Belanda.

Surakarta dan Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Mataram Islam yang terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah yang kekuasaannya mencapai wilayah Jawa Timur. Para ahli seperti Adrisijanti (2000), Passchier (2007), Nas (2007), dan Handinoto (2010) menyebutkan bahwasanya dua kota tersebut merupakan pusat peradaban Jawa yang ramai dan memiliki pola pusat kota Jawa Islam yang terencana dan baik. Sebagai wilayah inti kerajaan, tentunya Surakarta dan Yogyakarta memiliki daya tarik yang tinggi untuk masyarakat Jawa yang ada

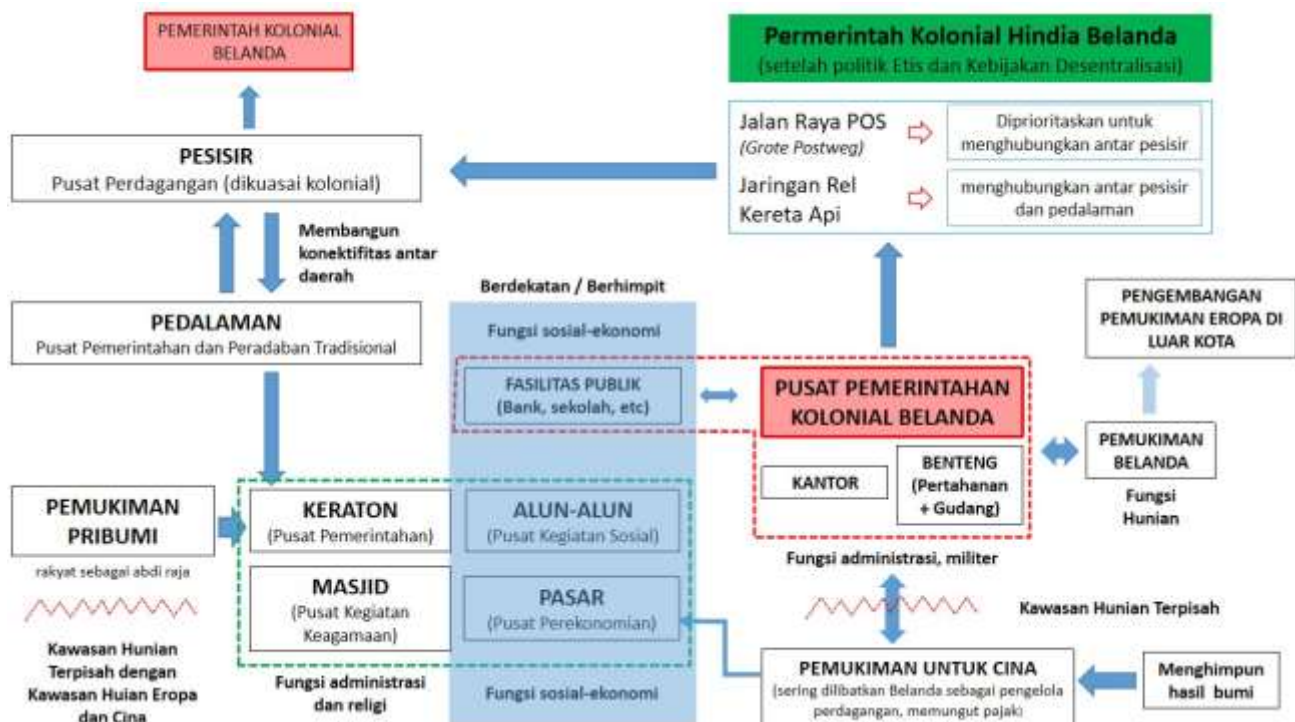
disekitarnya untuk datang dan bekerja (Surjomihardjo, 2008). Surjomihardjo (2008) menjelaskan bahwasanya berdagang di pasar atau bekerja bagi keluarga kerajaan dan bangsawan Jawa merupakan primadona saat itu karena selain mendapatkan penghidupan yang layak, mereka juga meningkat status sosialnya. Adrisijanti (2000) menjelaskan lebih lanjut bahwa kemudian mereka menetap di kampung-kampung yang berada di dalam atau sekitar kompleks keraton.

Untuk meningkatkan pemasukan melalui sektor perdagangan komoditas hasil bumi bagi Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak hanya sektor hilir saja yang dikuasai (pelabuhan). Sektor hulu (wilayah produksi) juga perlu dikuasai dan didukung oleh kebijakan politik yang sesuai. Hal inilah menurut peneliti yang kemudian mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk “mengintervensi” pusat pemerintahan kerajaan Jawa di pedalaman. Menurut Passchier (2007), Handinoto (2010), Leushuis (2014), dan Wihardyanto (2019) benteng merupakan wujud arsitektur awal yang didirikan oleh Belanda di suatu wilayah di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah sebagai tempat bermukim terbatas yang aman. Tak terkecuali di Surakarta dan Yogyakarta, Belanda mendirikan benteng yang berdekatan dengan keraton dan pasar, uniknya kedua benteng tersebut awalnya bernama Benteng Vastenburg meskipun pada akhirnya Benteng Vastenburg di Yogyakarta berubah nama menjadi Benteng Vredenburg. Peneliti menduga bahwasanya alasan pemilihan lokasi yang berdekatan dengan keraton dan pasar diantaranya adalah kemudahan mendapatkan bantuan dari keraton jika sewaktu-waktu diserang, dan kemudahan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Setelah keadaan mulai terkendali, Belanda selanjutnya membangun pusat pemerintahan kolonial yang lokasinya tidak jauh dari Benteng. Peneliti menduga bahwasanya alasan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada faktor keamanan dan koordinasi pemerintahan. Lambat laun seiring dengan semakin banyaknya penduduk Belanda yang datang, maka daerah di sekitar benteng dan juga kantor pemerintahan berkembang menjadi daerah permukiman Eropa, adapun penduduk etnis lain seperti Cina dan Arab mendirikan daerah permukiman tersendiri yang lokasinya diatur oleh pemerintah kolonial Belanda (Surjomihardjo, 2008). Surjomihardjo (2008) juga menambahkan bahwasanya penentuan lokasi permukiman ataupun fasilitas umum lainnya di wilayah kerajaan yang disebut dengan istilah *vorstenlanden* (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) ditetapkan bersama antara pemerintah kolonial Belanda dan pihak keraton melalui sebuah badan. Berdasarkan *Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta* Nomor 12 tahun 1917, di Yogyakarta badan pengelola tersebut dikenal dengan istilah *Departmen van Sultanaat Warken*, sedangkan di Surakarta dikenal dengan nama Kartirejo. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Belanda menerapkan status *zelfbesturende landschappen* (otonom dan berhak memerintah wilayahnya sendiri) sebagai konsekuensi dari Perjanjian Giyanti.



Gambar 11. Skema Intervensi Pemerintah Kolonial Belanda Pada Kota Pedalaman di Jawa Pada Masa Pemberlakuan Cultuurstelsel Berdasarkan Uraian Utama dari Nas (2007) dan Roosmalen (2014), dan didukung sumber-sumber lain. Sumber: Peneliti, 2020.

Kebijakan liberalisasi agraria yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda mampu menarik minat pengusaha-pengusaha swasta dari Belanda untuk berusaha di Indonesia khususnya di Jawa. Secara logis hal tersebut kemudian mendorong munculnya banyak bangunan perkantoran, serta perluasan kawasan permukiman bagi orang-orang Eropa di pusat kota untuk mendukung industri yang ada. Dengan demikian maka kebutuhan terhadap fasilitas umum juga mulai tumbuh, terutama fasilitas umum yang menunjang perekonomian, maupun kebutuhan infrastruktur dasar seperti rumah sakit, dan sekolah (Surjomihardjo, 2008). Menurut peneliti, tempat yang paling aman dan sesuai untuk mendirikan bangunan-bangunan fasilitas umum adalah di seputaran kawasan pusat kota karena selain aksesibilitasnya mudah karena dekat dengan permukiman orang-orang Eropa, tingkat keamanannya juga dirasa cukup karena dekat dengan pusat militer dan pemerintahan kolonial Belanda, dan tidak lupa adanya elemen pasar dikawasan pusat kota selain memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga sebagai penggerak ekonomi kota.

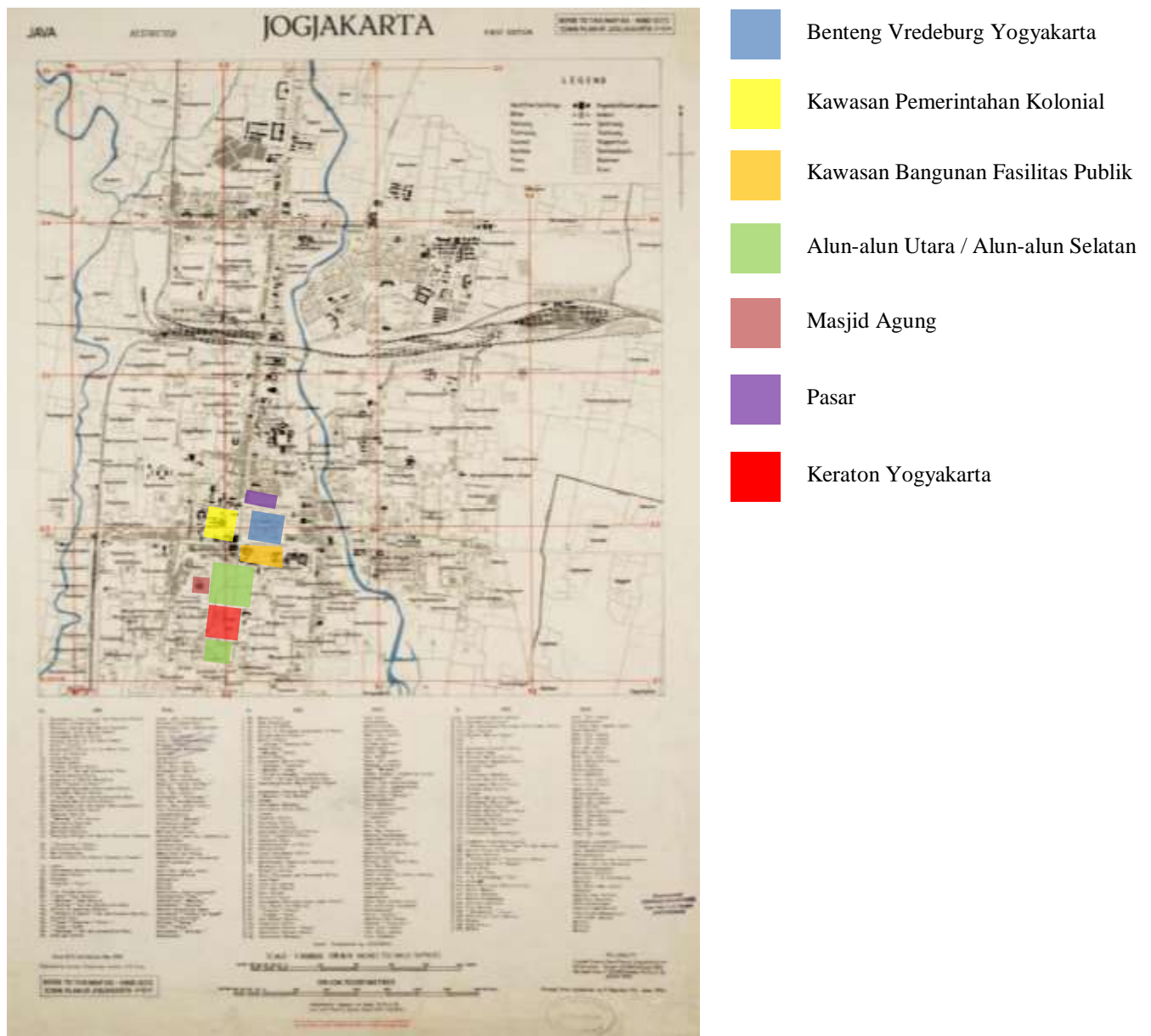


Gambar 12. Skema Intervensi Pemerintah Kolonial Belanda Pada Pusat Kota Pedalaman di Jawa Pada Masa Pemberlakuan Liberalisasi Agraria yang Diikuti oleh Pemberlakuan Politik Etis, dan Politik Desentralisasi Berdasarkan Uraian Utama dari Nas (2007) dan Roosmalen (2014), dan didukung sumber-sumber lain. Sumber: Peneliti, 2020.

Dengan demikian maka pusat kota pemerintahan kerajaan Jawa yang semula terdiri atas empat elemen utama catur gatra (keraton-alun-alun-masjid-pasar), berkembang menjadi lebih kompleks dan memiliki wajah Eropa karena terdapat beberapa bangunan Eropa seperti benteng, kantor pemerintahan kolonial Belanda, pemukiman untuk orang-orang Belanda, bangunan perkantoran, serta bangunan-bangunan fasilitas umum bergaya Eropa lainnya. Adanya intervensi bangunan-bangunan Eropa ke dalam kawasan pusat kota Jawa tidak mendapatkan pertentangan yang keras oleh orang-orang pribumi. Menurut peneliti hal ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah gaya hidup orang Eropa juga diikuti oleh orang-orang pribumi khususnya kaum bangsawan untuk mendapatkan status sosial yang sama dengan orang Eropa. Dan yang kedua adalah praktek sewa-menyewa tanah raja atau bangsawan untuk perusahaan pertanian maupun perkebunan menjadikan posisi tawar dari orang Eropa untuk memanfaatkan tanah pusat kota untuk kepentingan mereka menjadi tinggi. Praktek ini lebih lanjut kemudian didukung oleh penerapan Politik Etis yang intinya adalah kewajiban bagi pemerintah kolonial Belanda untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara Hindia Belanda. Hal ini kemudian direspon oleh penyediaan fasilitas-fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.



Gambar 13. Intervensi Elemen Arsitektur Kolonial Pada Kawasan Pusat Kota Surakarta.
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu/>, diakses 21 Februari 2020 diolah oleh Peneliti, 2020.



Gambar 14. Intervensi Elemen Arsitektur Kolonial Pada Kawasan Pusat Kota Yogyakarta.
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu/>, diakses 21 Februari 2020 diolah oleh Peneliti, 2020.

Proses yang terjadi tersebut menurut Kostof (1992) adalah merupakan proses pembentukan kota kolonial yang paling banyak dilakukan, lebih lanjut Kostof (1992) menyebut hal ini sebagai proses akulturasi karena identitas yang baru (Eropa) hadir menyesuaikan struktur kota tradisional yang telah ada sebelumnya serta tidak menghilangkan identitas tradisional yang ada. Oleh karena itu maka Nas (2007) menjelaskan bahwasanya kota-kota kolonial yang berada di pedalaman memiliki tetap memiliki wajah pribumi atau campuran dengan dominasi wajah pribumi.

KESIMPULAN

Kolonialisasi Belanda di Indonesia mampu membawa wajah baru bagi arsitektur dan kota di Indonesia. Pusat kota yang sebelumnya dibentuk dengan pendekatan kosmologis berkembang menjadi lebih fungsional dengan adanya beberapa bangunan-bangunan fasilitas umum yang bergaya Eropa di pusat kota. Namun demikian terdapat perbedaan pendekatan dan pengaruh kolonialisasi Belanda pada pusat kota-pusat kota di pesisir dan pusat kota-pusat kota di pedalaman Jawa. Pusat kota yang terdapat di pesisir Jawa menerima pengaruh kolonialisasi Belanda dengan cara akuisisi. Belanda membuat pusat kota dengan terlebih dahulu menguasai daerah pelabuhan dan mendirikan benteng. Selanjutnya dengan pendekatan Eropa, mereka memperluas daerah permukiman lengkap dengan fasilitas umum yang diperlukan. Proses ini dapat berjalan karena kerajaan telah menyerahkan pengelolaan daerah pesisir kepada Belanda sebagai imbalan keterlibatan Belanda pada suksesi kerajaan.

Berbeda dengan kota-kota di pedalaman Jawa yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan, dalam mempengaruhi pusat kota Belanda melakukan dengan pendekatan akulturasi. Hal ini dikarenakan Belanda tidak memiliki hak penuh atas tanah-tanah yang ada di pusat pemerintahan kerajaan. Oleh karena itu maka Belanda terlebih dahulu memperbesar posisi tawar mereka terhadap kerajaan dengan cara memberikan imbalan atas tanah-tanah raja dan bangsawan yang mereka sewa. Lama kelamaan, seiring dengan banyaknya orang-orang Eropa yang menyewa lahan maka ketergantungan akan industri pertanian dan perkebunan pun bagi kerajaan semakin besar. Dengan dalih memperlancar kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan penduduk maka kemudian dibangunlah beberapa fasilitas publik dan perkantoran di sekitaran kawasan pusat kota yang terlebih dahulu telah berdiri benteng dan kantor pemerintahan kolonial Belanda.

Cara mempengaruhi kawasan pusat kota yang berbeda antara kota-kota di pesisir Jawa dan di pedalaman Jawa berakibat pada perbedaan wajah kota. Kota-kota di pesisir Jawa akan cenderung menampilkan wajah kota Eropa atau campuran dengan dominasi Eropa. Sedangkan kota-kota di pedalaman Jawa akan cenderung menampilkan wajah kota pribumi atau campuran dengan dominasi pribumi.

DAFTAR REFERENSI

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Burgess, Ernest W. 1923. *Introduction to The Sciences of Sociology*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Damayanti, Rully, dan Handinoto. 2005. "Kawasan Pusat Kota Dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan Di Jawa." *Dimensi Teknik Arsitektur* 33 (1): 34-42.
- Handinoto. 1992. "Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu Dan Sekarang." *Dimensi Teknik Arsitektur* 18 (1): 1-15.
- Handinoto. 2010. *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kostof, Spiro. 1991. *The City Shapes, Urban Patterns and Meaning Through History*. London: Thames And Hudson.
- . 1992. *The City Assembled, The Elements of Urban Form Through History*. London: Thames And Hudson.
- Leuhuis, Emile. 2014. *Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Terpadu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munadar, Agus Aris. 2008. *Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Nas, Peter. 2007. *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nas, Peter, dan Martien De Vletter. 2009. *Masa Lalu dalam Masa Kini: Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Passchier, Cor. 2007. *Arsitektur Kolonial Di Indonesia Rujukan dan Perkembangan.* "In Masa Lalu Dalam Masa Kini :

- Arsitektur Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Reviyanto, dan Sri Suwito. 2008. *Dari Kabanaran Ke Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DIY.
- Roosmalen, Pauline. 2014. *Netherlands Indies Town Planning: An Agent for Modernisation (1905-1957)*. Leiden: Brill Publishers.
- Santoso, Suryadi Jo. 1984. "Konsep, Struktur, dan Bentuk Kota Jawa s,d, Abad 18."
- Short, John R. 1999. *An Introduction To Urban Geography*. London: Routledge And Kegan Paul.
- Silas, Johan. 2005. *Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia Dalam dan Sekitar Abad XX.* In *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: NIOD Netherlands- Penerbit Ombak.
- Soekiman, Djoko. 2011. *Kebudayaan Indis Dari Jaman Kompeni Sampai Revolusi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Soemardjan, Selo. 1962. *Social Changes in Yogyakarta*. New York: Cornell University Press.
- Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSOD.
- Suptandar, Pamuji. 2001. "Arsitektur Indisch Tinggal Kenangan." *Harian Kompas*, 2001.
- Surjomihardjo, Abdurrahman. 2008. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880- 1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- "The Ministry of Education And Culture." 2012. *Forts in Indonesia*. Jakarta: The Ministry of Education And Culture Republic of Indonesia.
- Wihardyanto, Dimas. 2019. "Pembangunan Permukiman Kolonial Belanda di Jawa; Sebuah Tinjauan Literatur." *Nature : National Academic Journal of Architecture* 6 (2): 146-61.